



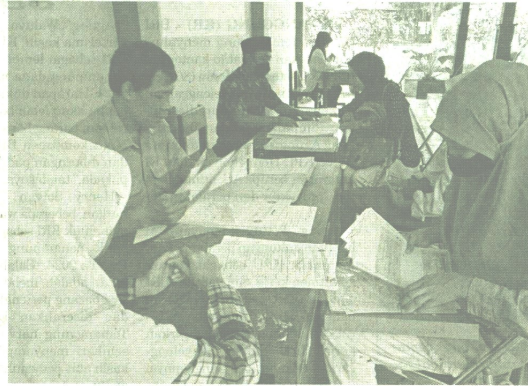
## Tahun 2023, Forpi Temukan Lima Isu Krusial

**YOGYA (KR)** - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mencatat, setidaknya ada lima isu krusial dari hasil pemantauan di lapangan maupun aduan masyarakat selama tahun 2023. Salah seorang anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba mengatakan, pertama persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu muncul setiap tahunnya. Dicontohkan, ada beberapa kasus calon siswa dari luar zonasi yang *nuntut* Kartu Keluarga (KK) warga sekitar sekolah agar bisa masuk di sekolah favorit.

"Meskipun secara aturan tidak mempersoalkan, namun secara etika moral itu cacat karena berbuat curang. Sehingga siswa yang sebenarnya warga asli Kota Yogyakarta harus tersingkir dan bersekolah di swasta karena kalah jarak maupun nilai dengan siswa yang *nuntut* KK. Ia berharap pada PPDB tahun ini tidak ada lagi ada temuan persoalan 'famili lain' ini. "Untuk itu dari awal harus ada verifikasi faktual kependudukan siswa. Jika memang terbukti bukan merupakan penduduk setempat, maka dipersilakan un-

tuk mencari sekolah lain, sehingga ada solusi yang ditawarkan," tutur Kamba, Minggu (7/1). Isu kedua menurut Kamba, persoalan sampah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Desentralisasi pengelolaan sampah pada setiap daerah yang ada di DIY belum semuanya bisa dilakukan karena persoalan minimnya lahan seperti di Kota Yogyakarta. "Tahun 2024 ini setidaknya pengelolaan TPST Piyungan Bantul dapat dikelola secara swadaya oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Bank-bank sampah yang ada di Kota

Yogyakarta dapat dihidupkan kembali. Jangan sampai keberadaan bank-bank sampah hanya tinggal plakatnya saja," jelasnya. Tim Forpi Kota Yogyakarta mencatat persoalan fasilitas publik terutama di kawasan bebas asap rokok atau KTR. "Sebut saja kawasan Malioboro merupakan salah satu KTR, namun dari hasil pantau kami, masih ditemukan orang yang merokok di kawasan Malioboro tersebut. Selain itu masih minimnya fasilitas dan informasi terkait Malioboro sebagai KTR," katanya. Juga keberadaan pasar



*Tim Forpi lakukan pantauan PPDB persoalan sampah belum sepenuhnya terselesaikan di Kota Yogyakarta.*

tradisional harus menjadi akses untuk masuk ke dalam pasar sangat minim. Kamba menyampaikan perlunya diadakan event untuk meramaikan pasar, salah satunya Pasar

Pinngit agar orang tertarik datang dan diperlukan sinergitas antar-OPD Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata serta pihak kewilayahan sangat perlu

Pinngit agar orang tertarik datang dan diperlukan sinergitas antar-OPD Dinas Perdagangan dan Dinas Pariwisata serta pihak kewilayahan sangat perlu

dilakukan agar pasar Pinngit tidak mati suri. Tim Forpi Kota Yogyakarta juga mencatat persoalan akta kependudukan anak. Karena berdasar hasil pemantauan Forpi Kota Yogyakarta di sejumlah sekolah dasar (SD) masih ditemukan anak yang belum memiliki akta lahir dengan alasan yang beragam. "Setidaknya ada belasan anak yang belum memiliki akta lahir. Tahun 2024 ini Forpi Kota Yogyakarta berharap zero persoalan anak yang belum memiliki akta lahir. Karena akta lahir anak merupakan hak setiap anak dan anak harus memilikinya," ungkap Kamba. "Namun kami juga mengapresiasi tindakan tegas dari OPD terkait sejumlah pelanggaran yang terjadi misalnya parkir tidak pada tempatnya dan APK yang dipasang melanggar aturan," pungkasnya. (\*-1)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005